

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas pembangunan nasional yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan dan pengawasan keamanan segar sesuai karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonom dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Pemantapan ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional karena : (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling azasi bagi manusia; (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga sub sistem yaitu : a) Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk; b) Distribusi pangan yang lancar dan merata; c) Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan. Pemantapan ketahanan pangan dapat dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan akan terus dilaksanakan sebagai penggerak utama pembangunan sosial-ekonomi nasional dan daerah. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan perlu diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Renstra SKPD merupakan dokumen yang memuat isi visi dan misi SKPD, tujuan, strategi dan arah kebijakan SKPD, program / kegiatan SKPD dalam 5 (lima) tahun ke depan beserta pendanaan indikatifnya serta indikator kinerjanya untuk mencapai sasaran dalam RPJMD.

Renstra SKPD merupakan pedoman/acuan SKPD dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPDP harus terukur dan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan anggaran.

Dalam rangka mewujudkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan disusun Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2012 – 2017. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk : (1) harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan secara terpadu, terfokus dan terprogram dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian; (2) sebagai bahan dalam melaksanakan acuan, kebijakan program strategis pembangunan ketahanan pangan dalam kurun waktu 2007 – 2012.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memuat penjelasan maksud

dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3.1. Maksud

Penetapan Renstra SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus pedoman penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan selama periode 5 (lima) tahun kedepan.

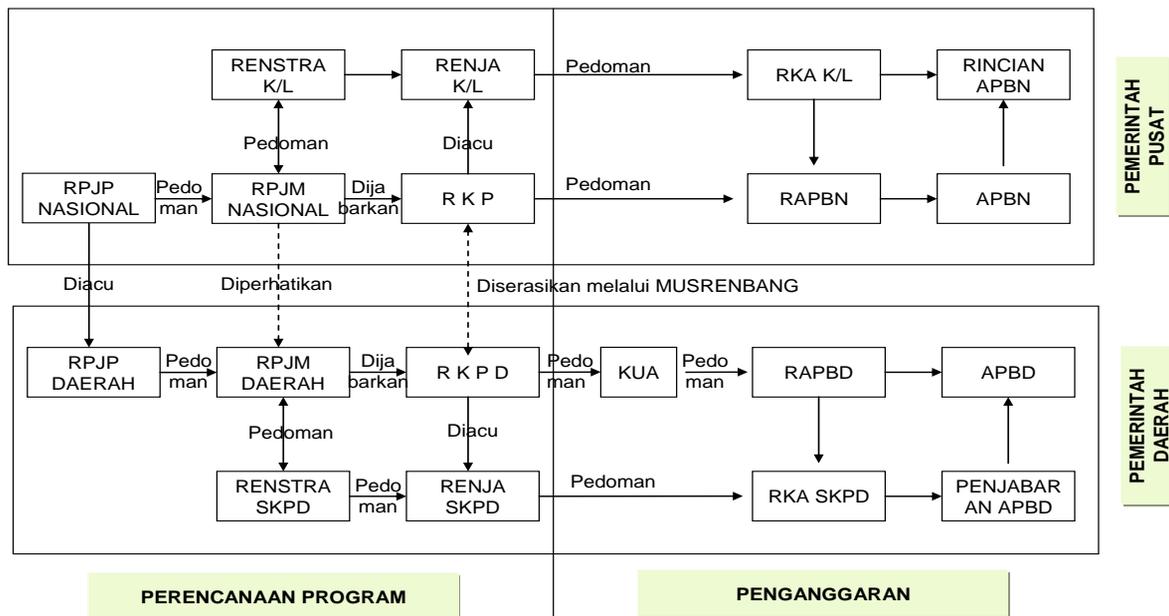
1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan kedalam arah kebijakan dan program yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2012 – 2017 dalam upaya mendukung ;pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017;
2. Menyediakan satu rujukan dokumen resmi bagi SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APBN serta sumber dana lainnya;
3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan ketahanan pangan, perencanaan dan penganggaran dengan SKPD yang menangani ketahanan pangan di tingkat Kabupaten dan Kota;
4. Untuk instrumen penilaian kinerja SKPD dari aspek anggaran dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
5. Untuk pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota yang menangani ketahanan pangan se- provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Dalam bagan / tabel di bawah ini digambarkan hubungan dokumen Renstra SKPD dengan dokumen lainnya



Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan dokumen lainnya.

Proses penyusunan Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah sebagai ditampilkan dalam bagan berikut berikut :

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan Renstra SKPD Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Teknokratik yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
2. Partisipatif yaitu pendekatan perencanaan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Politik yaitu agenda-agenda pembangunan berdasarkan kebijakan kepala daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD.
4. Atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui Forum SKPD .

5. Kompetitif yaitu dilaksanakan dengan metode seleksi proposal usulan program dan kegiatan dengan kriteria tertentu dan melalui beberapa tahapan seleksi.
6. Sosio-kultural yaitu perencanaan melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

Selain melalui beberapa pendekatan, yang perlu diperhatikan adalah dalam penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagaimana berikut :

- a) Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional;
- b) Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah;
- c) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- d) Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- e) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional;
- f) Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- g) Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

1.5. Sistematika Penyusunan Renstra SKPD

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra SKPD, proses penyusunan Renstra SKPD, kedudukan Renstra SKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen Renstra SKPD dengan dokumen lainnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra SKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Memberikan penjelasan tentang hubungan Renstra SKPD dengan dokumen lain yang relevan.

1.4. Sistematika Dokumen Renstra SKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Renstra SKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD bagi SKPD yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen Renstra SKPD bagi daerah yang bersangkutan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini memberikan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, memberikan informasi capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, memberikan informasi hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memberikan informasi dan penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.2 Sumber Daya SKPD

Memberikan penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode 2007-2012, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Bagian ini menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan saja tugas dan fungsi SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan SKPD;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Akan menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 – 2017.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2012 - 2017.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menjelaskan indikator kinerja SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah; Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi: (a) perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, (b) pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang ketahanan pangan, (c) pembinaan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan, (d) pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. 1 (satu) jabatan Kepala Badan yang setara dengan jabatan eselon IIa;
- b. 1 (satu) jabatan Sekretaris Badan yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- c. 3 (tiga) jabatan Kepala Bidang yang setara dengan jabatan eselon IIIa;
- d. 3 (tiga) jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat yang setara dengan jabatan eselon IVa;
- e. 6 (enam) jabatan Kepala Sub Bidang yang berada di Bidang yang setara dengan jabatan eselon IVa;

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan tugas desentralisasi dan tugas dekonsentrasi serta tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan;

Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;

- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
- d. penyiapan pedoman dan standar penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan;
- e. penyiapan rencana makro ketahanan pangan lintas Kabupaten/Kota;
- f. pengembangan dukungan pembangunan ketahanan pangan di daerah;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- h. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyuluhan pertanian;
- i. pengelolaan urusan kesekretariatan Badan.

2. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, administrasi keuangan dan pembinaan kepegawaian, perencanaan anggaran, data dan statistik kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Ketahanan Pangan;

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Badan mempunyai fungsi :

- a. pembuatan program kerja dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian program kerja Sekretariat Badan;
- b. pengkoordinasian sub bagian dan staf yang berada di bawah Sekretariat Badan;
- c. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan penyuluhan;
- e. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan;
- g. pelaksanaan urusan perencanaan anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
- h. pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang ketahanan pangan;
- i. pelaksanaan urusan data dan statistik;
- j. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- k. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana
- l. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;

- m. pembinaan staf;
- n. pengevaluasian dan pembuatan laporan;
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan ketersediaan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan produksi pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan akses pangan;
- c. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian dan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan;
- e. penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- f. evaluasi pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan pencegahan serta penanggulangan kerawanan pangan;
- g. melaksanakan pembinaan staf;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan rumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan dan harga pangan;

- b. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan cadangan pangan
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan distribusi pangan;;
- d. pemantauan distribusi pangan dan harga pangan;
- e. evaluasi kegiatan distribusi pangan dan harga pangan;
- f. Pembinaan staf;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan.

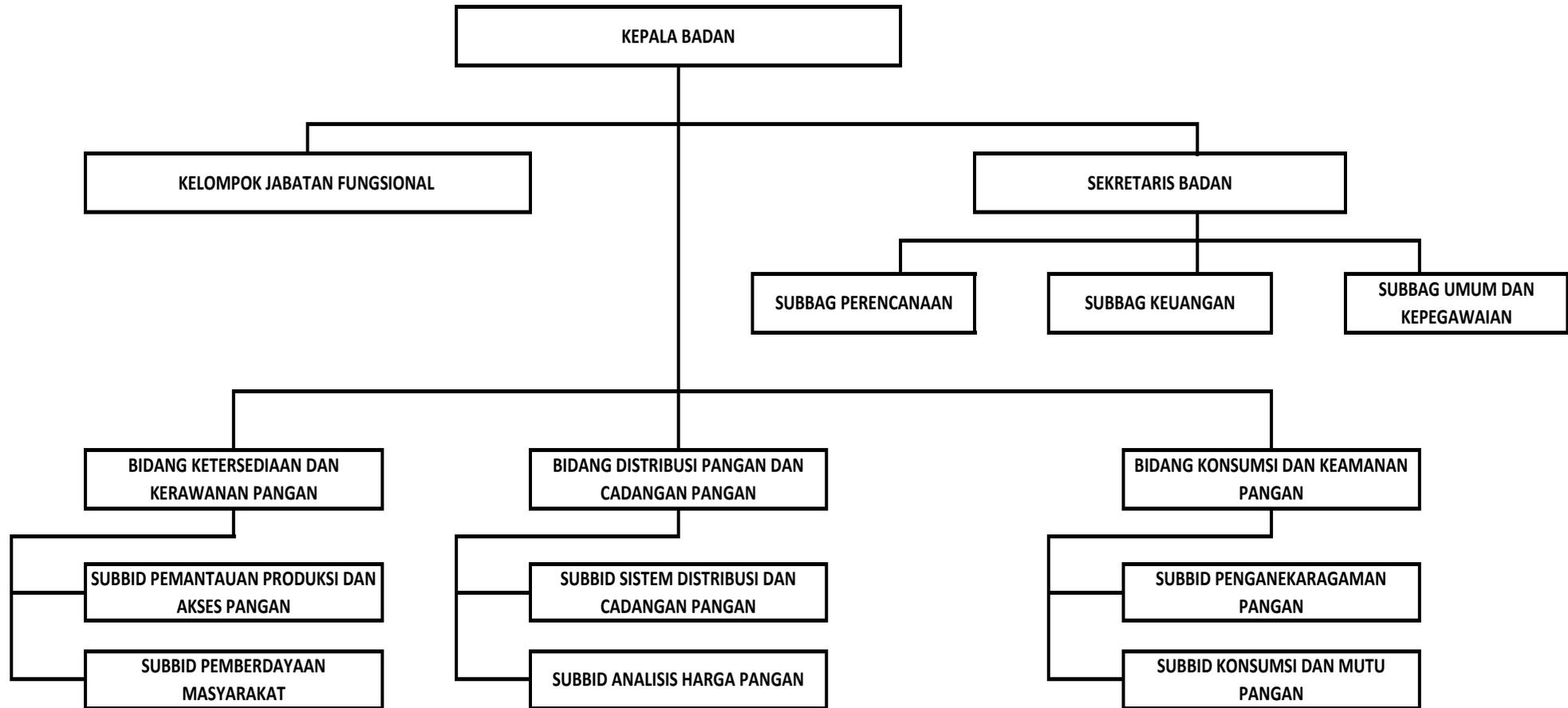
Dalam melaksanakan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan konsumsi pangan;
- b. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan;
- c. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan keamanan pangan;
- d. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan preferensi pangan masyarakat;
- e. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan pola konsumsi pangan;
- f. evaluasi pelaksanaan kegiatan pemantauan konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. melaksanakan pembinaan Staf

Dibawah ini adalah Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERDA NO. 1 TAHUN 2013



2.2 Sumber Daya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012

Tabel 1. Data Kepegawaian Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010

| JENJANG | PNS | | CPNS | | JUMLAH CPNS/PNS |
|---------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|
| | LAKI- LAKI | PEREMPUAN | LAKI- LAKI | PEREMPUAN | |
| S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| S1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| DIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DIII | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| SMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| SMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |

| JENJANG | LAKI- LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---------|---------------|-----------|--------|
| ESSELON | 6 | 8 | 13 |
| II | 1 | 0 | 1 |
| III | 1 | 2 | 3 |
| IV | 4 | 4 | 9 |

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 maka Badan Ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diberikan urusan pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada dasarnya kegiatan Badan Ketahanan pangan adalah sebagai “*pengkajian, koordinatif, perumusan kebijakan, dan mengevaluasi pelaksanaan Program peningkatan Ketahanan Pangan*”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD

untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan, juga telah mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu: Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Dalam kerangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan, Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu Unit eselon I pada Kementerian Pertanian, mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang ketahanan pangan, bersama-sama instansi terkait lainnya dalam memantapkan ketahanan pangan terutama dalam meningkatkan percepatan diversifikasi pangan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis di bidang ketahanan pangan perlu ditingkatkan guna terwujudnya pemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan pada lampiran tabel 1 sebagai berikut :

1. Dipertahankannya ketersediaan energi penduduk sebesar 2.200 KiloKalori/kapita/hari dan ketersediaan energi protein sebesar 57 gram/kapita/hari. Dari hasil analisis pada tabel 1, ketersediaan energi bagi penduduk sebesar 2.200 Kkal/kapita telah terpenuhi pada capaian setiap tahun dengan rata-rata ketersediaan energi sebesar 2.490

Kkal/kapita dan ketersediaan energi protein (protein hewani dan nabati) bagi penduduk telah dipenuhi dengan rata-rata ketersediaan energi protein 130 gram/kapita. Dari target pelayanan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) bidang ketahanan pangan, penyediaan energi penduduk 90% atau sebesar 1980 Kkal/kapita telah dipenuhi pada tahun ke-1 yaitu 2330 Kkal/kapita. Untuk ketersediaan energi protein yang diamanatkan pada SPM Ketahanan Pangan sebesar 90% atau 52 gram/kapita juga telah terpenuhi pada tahun ke-1 dengan capaian 97 gram/kapita ;

2. Tersedianya cadangan pangan bagi masyarakat yang terdiri dari cadangan pangan pemerintah sebesar 200 ton dan cadangan pangan masyarakat sebesar 100 Kg. Dari analisis kinerja pada tabel 1 menunjukkan penyediaan cadangan pangan pemerintah yang diamanatkan sebesar 200 ton belum terpenuhi sedangkan untuk cadangan pangan masyarakat telah terpenuhi pada tahun ke-3 dan tahun ke-4, sedangkan pada tahun ke-5 cadangan pangan masyarakat ini belum terfasilitasi.
3. Tersedianya informasi pasokan, harga dan akses pangan yang berkesinambungan sepanjang tahun. Dari hasil analisis menunjukkan penyediaan informasi ini 100% atau 52 minggu dalam satu tahun baru dicapai sebesar 24 minggu atau baru tercapai 50% dari amanat SPM Ketahanan Pangan.
4. Meningkatnya pola konsumsi pangan penduduk sebagai implementasi dari gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan dengan capaian skor 90 pada tahun 2015. Dari hasil analisis kinerja SKPD pada tabel 1, capaian pola pangan harapan sampai dengan tahun ke-5 dengan skor 86,2 sedangkan amanat dalam SPM Ketahanan Pangan skor 90 akan dicapai pada tahun 2015. Keberhasilan pencapaian pola konsumsi pangan ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan, sosial budaya masyarakat, akses masyarakat terhadap pangan serta pola konsumsi pangan yang diterapkan di tingkat keluarga.
5. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar terhadap peredaran pangan segar hasil pertanian yang beredar belum terpenuhi dari amanat SPM Ketahanan pangan sebesar 80%. Pengawasan

peredaran keamanan pangan dari hasil analisis pada tabel 1 baru melayani 4 kabupaten/kota sedangkan amanat SPM Ketahanan pangan minimal pengawsan keamanan pangan dilakukan di 6 kabupaten/kota.

6. Intervensi terhadap daerah rawan pangan dengan amanat SPM Ketahanan pangan 60% di semua kabupaten/kota baru melayani 1,4 kabupaten/kota sedangkan intervensi penanganan daerah rawan pangan ini seharusnya setiap tahun dapat melayani minimal 4 kabupaten/kota.

Untuk rasionalisasi anggaran dan pertumbuhan anggaran dengan realisasi anggaran pada SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun terakhir pada lampiran tabel 2 adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan rasio rata-rata antara anggaran dan realisasi selama 5 (lima) tahun yaitu 0,92 dengan rata-rata pertumbuhan anggaran Rp 482.568.390,00 dan rata-rata realisasi Rp 441.405.166,00;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan rasio rata-rata antara anggaran dan realisasi selama 5 (lima) tahun yaitu 0,76 dengan rata-rata pertumbuhan anggaran Rp 402.742.000,00 dan rata-rata realisasi anggaran Rp 321.31.800,00;
3. Program peningkatan disiplin aparatur dengan rasio rata-rata antara anggaran dan realisasi selama 5 (lima) tahun yaitu 0,20 dengan rata-rata pertumbuhan anggaran Rp 11.880.000,00 dan rata-rata realisasi anggaran Rp 11.801.700,00;
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan rasio rata-rata antara anggaran dan realisasi selama 5 (lima) tahun yaitu 0,92 dengan rata-rata pertumbuhan anggaran Rp 674.067.730,00 dan rata-rata realisasi anggaran Rp 605.904.336,00.

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra | | | | | Realisasi Capaian ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|----------------|-------|------|------|------|-----------------------|-------|--------|--------|-------|------------------------------|------|-------|-------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1. | Ketersediaan Energi perkapita (Kkal) | 90% | 2.200 | 2.200 | 1760 | 1870 | 1980 | 2090 | 2200 | 2.330 | 2.494 | 3.174 | 2.220 | 2.230 | 1,32 | 1,33 | 1,60 | 1,06 | 1,01 |
| 2. | Ketersediaan Energi protein perkapita (gram) | 90% | 57 | 57 | 51 | 51 | 51 | 54 | 57 | 97 | 112 | 231 | 93 | 116 | 1,90 | 2,19 | 4,51 | 1,72 | 2,03 |
| 3. | Cadangan pangan pemerintah (Ton) | 60% | 200 | 25 | 25 | 50 | 120 | 140 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 4. | Cadangan pangan masyarakat (Kg) | 60% | 1.000 | 14 unit lumbung | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 0 | 0 | 24.000 | 32.941 | 0 | - | - | 48,00 | 43,92 | - |
| 5. | Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan (informasi mingguan) | 100% | 52 Minggu | 10 Komodit | 24 | 36 | 52 | 52 | 52 | 0 | 12 | 12 | 24 | 24 | - | 0,33 | 0,23 | 0,46 | 0,46 |
| 7. | Pola Pangan Harapan | 90 | 95 | 7 Kab/Kota | 84,4 | 87,05 | 90 | 95 | 95 | 83,7 | 70,7 | 82,7 | 78,7 | 86,2 | 0,99 | 0,81 | 0,92 | 0,83 | 0,91 |
| 8. | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar (sampel) | 80% | 35 | 7Kab/Kota | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | 1,00 | 0,86 | 0,71 | 0,57 |
| 9. | Penanganan daerah rawan pangan (KK/Kab/Kota) | 60% | 205 | 7 Kab/kota | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,43 |

Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------|------|------|------|-----------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Program Pelayanan Administrsi Perkantoran | 404.200.000 | 462.728.000 | 487.104.200 | 401.607.150 | 657.202.600 | 335.600.931 | 439.380.586 | 476.231.440 | 385.985.810 | 569.827.061 | 0,83 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | 0,87 | 482.568.390 | 441.405.166 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 968.650.000 | 342.040.000 | 177.050.000 | 137.950.000 | 388.020.000 | 949.939.800 | 229.057.000 | 146.351.000 | 128.501.500 | 152.709.700 | 0,98 | 0,67 | 0,83 | 0,93 | 0,39 | 402.742.000 | 321.311.800 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | - | - | - | 59.400.000 | - | - | - | - | 59.008.500 | - | - | - | - | 0,99 | 11.880.000 | 11.801.700 |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan | 968.670.000 | 630.972.000 | 534.196.250 | 406.025.000 | 830.475.400 | 780.685.175 | 594.323.500 | 514.965.850 | 393.918.816 | 745.628.338 | 0,81 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,90 | 674.067.730 | 605.904.336 |

2.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Telaahan Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Bappeda menjalankan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan, dengan lebih khusus melakukan Perumusan Kebijakan, Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Masing-masing lembaga perencana baik ditingkat pusat maupun provinsi melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga sub sistem yaitu : a) Ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk; b) Distribusi pangan yang lancar dan merata; c) Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan. Untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang mantap, dalam pelaksanaan program harus memperhatikan kebijakan PANCA YASA yaitu memfokuskan pada lima fundamental penanganan pertanian yang mencakup:

- 1) Pembangunan/perbaikan infrastruktur perbenihan, riset dan sebagainya;
- 2) Penguatan kelembagaan petani melalui pertumbuhan dan penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani;
- 3) Perbaikan penyuluhan melalui penguatan kelembagaan penyuluhan dan tenaga penyuluh;
- 4) Perbaikan pembiayaan pertanian melalui perluasan akses petani ke sistem pembiayaan;
- 5) Penciptaan sistem pasar pertanian yang menguntungkan petani.

Keterlibatan seluruh masyarakat untuk mengawal arah pembangunan daerah khususnya di pembangunan ketahanan pangan agar berjalan dan terlaksana dengan baik akan terwujud apabila disusun perencanaan yang sinergis dan terintegrasi serta memperhatikan keberlanjutan proses perencanaan.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah kemandirian pangan masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman

konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.

Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut pertumbuhan penduduk, semakin terbatasnya sumber daya alam dan beralih fungsinya lahan pertanian, masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin. Permintaan bahan pangan per kapita juga meningkat didorong oleh meningkatnya pendapatan, kesadaran kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat.

Dengan melihat tantangan yang semakin berat pada 2012-2017, maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Masalah yang bersifat internal
 - a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, pengkajian, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel.
 - b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
2. Masalah yang bersifat eksternal, menyangkut aspek yakni: ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan dan manajemen ketahanan pangan antara lain:

a. Ketersediaan dan kerawanan pangan

Semakin terbatasnya kapasitas produksi pangan daerah disebabkan beberapa kendala antara lain : (i) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; (ii) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; (iii) semakin terbatas dan tidak pastinya penyediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan; (iv) rusaknya prasarana pengairan; (v) penambangan timah; (vi) kerusakan yang disebabkan oleh kekeringan maupun banjir semakin tinggi karena fungsi perlindungan alamiah telah sangat berkurang; (vii) masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian, masih menjadi kendala yang menyebabkan penurunan kemampuan penyediaan pangan.

Komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah yang telah disepakati oleh provinsi sebesar 200 ton dan kabupaten sebesar 100 ton sejauh ini masih kurang difasilitasi. Sedangkan dari segi kerawanan pangan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastruktur serta kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.

b. Distribusi Pangan

Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan, merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan. Pembinaan distribusi dan harga pangan melalui pelaksanaan monev harga pangan strategis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan, penyediaan hasil

analisis, peta distribusi pangan strategis yang akurat masih terbatas.

Permasalahan dalam aspek distribusi pangan meliputi belum terpolanya distribusi bahan pangan antar kabupaten/kota dimana arus keluar masuk bahan pangan melalui banyak pintu-pintu masuk pelabuhan yang tersebar di kabupaten/kota sehingga menyulitkan dalam pemantauan distribusi bahan pangan tersebut, hal ini mengakibatkan tingginya harga pangan

c. Konsumsi dan keamanan Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah yang dicirikan dengan pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman. Sampai saat ini konsumsi beras per kapita masih sangat tinggi, yaitu sekitar 111,84 kg/kapita/tahun. Dengan jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah, serta persaingan pemanfaatan sumberdaya yang semakin ketat, maka dominasi beras dalam pola konsumsi pangan ini cukup memberatkan upaya pemantapan ketahanan pangan berkelanjutan yang tertumpu pada sumberdaya wilayah (lokal).

Permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi dan diantisipasi dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman adalah : (1) keterbatasan kemampuan ekonomi; (2) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan dan gizi; (3) keterbatasan kemampuan mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat sebagai pangan alternatif pengganti beras (substitusi); (4) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan; (5) pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum; (6) pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, serta (7) pengelolaan

konsumsi dalam rumah tangga yang kurang diperhatikan kebutuhan gizi setiap individu anggotanya. Belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat sehingga konsumsi pangan masih terpaku pada komoditas tertentu. Konsumsi pangan umbi-umbian masih rendah sedangkan konsumsi beras semakin menjadi pangan semakin strategis di masyarakat sehingga diperlukan perubahan pola pikir melalui sosialisasi gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan di masyarakat dengan pemenuhan sumber karbohidrat selain beras.

Penganekaragaman pangan dapat berjalan dengan baik melalui dukungan dari stakeholder yang terkait melalui koordinasi yang baik. Kegiatan penganekaragaman dapat mencapai tujuan dengan cara lintas sektor berbagai stakeholder, apabila tidak ada dukungan dari sektor lainnya tentu penganekaragaman pangan tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Penganekaragaman bertujuan agar masyarakat dapat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman sesuai dengan spesifik lokasi yaitu pangan lokal dan makanan tradisional. Hal ini tentunya harus didukung oleh ketersediaan bahan baku dan ketersediaan pemasaran, dan teknologi pengolahannya. Semua itu dapat dicapai dengan dukungan dari stakeholder yang terkait. Pengkajian dan perumusan kebijakan serta Pelaksanaan penganekaragaman pangan dapat dilakukan dengan adanya dukungan data yang akurat dan valid serta pelaporan yang tepat waktu baik data yang bersumber dari stakeholder lain atau pun dari kabupaten/kota. Dengan adanya data yang valid akan memudahkan dalam penyusunan kebijakan dan perumusan perencanaan dan kebijakan sehingga kebijakan yang dibuat akan tepat. Faktor yang mempengaruhi dari ketersediaan data dan pelaporan adalah data yang masih kurang tersedia dan kurang valid dan pelaporan yang tidak tepat waktu. Penyebabnya sumberdaya manusia yang menangani hal tersebut masih kurang

jumlahnya, data tidak rutin tercatat serta dana yang mendukung ketersediaan database masih belum ada.

Sampai saat ini, pembinaan penganeekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan masih belum optimal, yang ditandai oleh (a) keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal; dan (b) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; (c) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganeekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas; dan (d) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Hasil pemantuan dan evaluasi keamanan pangan menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain: (a) kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar; (b) belum difahami dan diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar; (c) belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan pengawet; (d) masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan higiene dalam produksi; (f) masih rendahnya kesadaran para ritel untuk menjual produk segar yang aman dan bermutu; (g) belum efektifnya penanganan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas; (h) Belum adanya laboratorium yang telah terakreditasi; (i) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar; (j) standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanannya masih mudah masuk ke daerah; (k) belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi

pelanggar hukum di bidang pangan segar; (l) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal; dan (m) kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

d. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan

Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non-teknis, merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Berbagai permasalahan yang dihadapi perlu ditanggulangi secara terkoordinasi, antara lain:

- Komitmen anggota DKP sebagai lembaga koordinatif dalam penanganan ketahanan pangan khususnya dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan pada Rapat Koordinasi DKP dirasakan masih belum dijabarkan dalam bentuk program kerja.
- Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang dibentuk di Provinsi dan kabupaten/kota belum seragam, sehingga gerak manajemen kelembagaan pembangunan ketahanan pangan menjadi tidak optimal, selain itu masih ada Kabupaten yang belum membentuk kelembagaan ketahanan pangan.
- Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan dan kurang berkelanjutan, terutama pada pelaksanaan program kabupaten/kota.
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan. Yang dinilai suatu kebijakan/program/kegiatan masih bersifat penilaian realisasi fisik dan keuangan, belum menyentuh analisis mendalam terkait dengan hasil dan manfaat dari kebijakan/program/kegiatan. Sehingga akan berdampak

kepada penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

- Penyediaan hasil analisis, peta ketahanan pangan serta hasil kajian ketahanan pangan yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia secara periodik.
- Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program
- Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
- Belum diterapkannya Standart Pelayanan Minimal di bidang ketahanan pangan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD Tahun 2012-2017

Memperhatikan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dengan visi *“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera”* serta memperhatikan visi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 yaitu *“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal Melalui Pengembangan Sinergitas dan Konektivitas Perkotaan dan Perdesaan”*, maka prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012- 2017 adalah:

- I. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan / kecamatan / kabupaten / kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi

mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wlaya dan antar sektoral;

- II. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (society empowerment) dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui keterliatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- III. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakuka upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi;
- IV. Mempercepat pmbanunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat umbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global;
- V. Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.

Pada tahap pembangunan lima tahun kedua, pemerintah diharapkan lebih memfokuskan perhatiannya pada kebijakan dan upaya konkrit untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Sesuai dengan visinya, maka perhatian utama diberikan pada bidang-bidang yang akan berdampak kuat dan luas pada pembangunan agri-bahari, yaitu perkebunan, perikanan dan pariwisata. Di samping itu, pada tahap ini

juga sudah mulai dirintis pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan hasil produk perkebunan dan perikanan.

Strategi pembangunan yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan perhatian khusus pada percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan), sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Kerjasama pengembangan ekonomi harus dirintis tidak saja sebatas antar kabupaten/kota dalam provinsi, tetapi juga dengan daerah-daerah lain di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam proses pembangunan ekonomi ini, pemerintah hendaknya tetap menerapkan kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Di samping itu, penyelesaian masalah kerusakan lingkungan hidup diyakini tidak dapat diselesaikan dalam 5 tahun pertama dan karenanya kebijakan dan upaya konkrit tersebut tetap harus diupayakan pada lima tahun kedua dan seterusnya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Telaahan Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Bappeda menjalankan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan, dengan lebih khusus melakukan Perumusan Kebijakan, Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Masing-masing lembaga perencana baik ditingkat pusat maupun provinsi melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga tidak terlepas dari RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena renstra disusun dengan memperhatikan RPJMD, sedangkan dalam penyusunan RPJMD maka RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu dokumen yang harus diacu dalam penyusunannya disamping dokumen lainnya. Didalam Rancangan Akhir RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satu substansinya adalah rencana struktur ruang. Struktur ruang wilayah merupakan kerangka dasar sistem prasarana dan sarana wilayah di dalam pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah dapat berupa pemanfaatan potensi, juga dalam kerangka mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Atas dasar potensi dan permasalahan/kendala serta tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pengembangan struktur ruang wilayah diarahkan untuk :

- Memperkuat kualitas prasarana dan sarana wilayah, khususnya sistem transportasi dan pusat-pusat pelayanan, dalam rangka pembangunan yang berkeselimbangan.
- Memperkuat kualitas prasarana dan sarana kawasan-kawasan potensial.
- Memperkuat prasarana dan sarana yang berorientasi lingkungan.

Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Oleh karena itu dalam rangka mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah maka Badan Ketahanan Pangan berfungsi mensinergikan kegiatan ketahanan pangan dengan konsep pemanfaatan lahan yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kajian Lingkungan Hidup Strategis. Sehingga kedepan diharapkan sinergitas tata ruang dengan kegiatan pembangunan akan semakin tercapai.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang Ketahanan Pangan secara umum, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas umum Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

1. Masih rendahnya ketersediaan pangan dari produksi lokal;
2. Masih panjangnya rantai distribusi dari produsen ke konsumen ;
3. Belum optimalnya gerakan percepatan pengankeragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan keamanan pangan segar;
4. Belum optimalnya fungsi dan peran kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

3.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sampai saat ini, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Potensi dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan, secara umum masih cukup tersedia potensi sumberdaya alam dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Sedangkan dari kapasitas sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi, memiliki potensi untuk ditingkatkan, untuk mendukung pengembangan ketersediaan dan distribusi pangan serta perbaikan konsumsi pangan. Di sisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat, berpeluang semakin

besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan. Adapun tantangan dan peluang dari aspek ketahanan pangan:

1. Ketersediaan Pangan

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang ada dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, maka pengelolaan lahan dan air merupakan sumberdaya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Badan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan, memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan (b) penyempurnaan sistem pemantauan produksi pangan dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan (c) mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan pangan serta (d) pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

2. Distribusi Pangan

Masalah dan tantangan dalam subsistem distribusi pangan mencakup aspek prasarana dan sarana, kelembagaan pemasaran, pungutan resmi dan tidak resmi, gangguan keamanan serta pengaturan dan kebijakan. Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi pada saat panen, sebaliknya meningkatkan harga secara tajam pada musim paceklik.

Distribusi pangan di dalam negeri juga dipengaruhi oleh perdagangan pangan internasional yang tidak dapat diabaikan dalam era globalisasi saat ini. Tantangan yang timbul, antara lain : (1) pengaruh harga pangan

internasional terhadap pangan dalam negeri akibat perlakuan yang tidak adil dalam melaksanakan komitmen perdagangan pangan internasional; (2) besarnya tekanan persaingan global dalam rangka mengefisiensikan rantai pasokan dari perusahaan asing yang bergerak dalam usaha pengolahan pangan di Indonesia, mengakibatkan rendahnya akses pangan untuk pemasok bahan baku hasil produksi petani lokal; (3) Besarnya tekanan terhadap daya saing produk bahan pangan lokal, akibat pesatnya kemajuan teknologi dalam memproduksi pangan secara efisien dan berkualitas dari negara-negara maju.

Badan Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang memantapkan distribusi pangan yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan (b) penyempurnaan program dan kegiatan dalam pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan; serta (4) pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses pangan.

3. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Potensi sumberdaya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah dan sepanjang waktu, sehingga terbuka peluang untuk pengembangan diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal dan makanan tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Penganekaragaman pangan dapat berjalan dengan baik melalui dukungan dari stakeholder yang terkait melalui koordinasi yang baik. Kegiatan penganekaragaman dapat mencapai tujuan dengan cara lintas sektor berbagai stakeholder, apabila tidak ada dukungan dari sektor lainnya tentu penganekaragaman pangan tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Penganekaragaman bertujuan agar masyarakat dapat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman sesuai dengan spesifik lokasi yaitu pangan lokal dan makanan

tradisional. Hal ini tentunya harus didukung oleh ketersediaan bahan baku dan ketersediaan pemasaran, dan teknologi pengolahan pangannya. Semua itu dapat dicapai dengan dukungan dari stakeholder yang terkait.

Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam gizi, seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai status gizi yang baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran gizi. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha di bidang pangan terutama UKM pangan dalam penanganan keamanan pangan, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

4. Manajemen Kelembagaan Ketahanan Pangan

Kemampuan manajemen ketahanan pangan nasional dan daerah, merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional hingga rumah tangga. Keberadaan Dewan Ketahanan Pangan merupakan suatu peluang untuk mensinergikan berbagai macam program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dengan melibatkan anggota DKP dan lintas sektor terkait, sehingga akan tercapai suatu hubungan yang harmonis antara Kabupaten/kota dan Provinsi.

3.7. Analisis SWOT Renstra Badan Ketahanan Pangan

Analisis SWOT merupakan suatu proses kreatif dalam merencanakan strategi, kebijakan dan program-program kerja suatu organisasi atau unit organisasi dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal

organisasi tersebut baik pada posisi positif maupun negatifnya. Analisis SWOT Badan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4. Tabel Isu-isu strategis pada faktor internal dan eksternal SWOT Badan Ketahanan Pangan

| No | KEKUATAN (S) | NO | KELEMAHAN (W) |
|-----------|--|-----------|--|
| S1 | Komitmen dalam penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi | W1 | Rendahnya ketersediaan pangan dari produksi lokal |
| S2 | Potensi sumberdaya pangan lokal yang tersedia | W2 | Belum optimalnya gerakan percepatan pengankeragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan keamanan pangan segar |
| S3 | Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang telah Terbentuk | W3 | Masih panjangnya rantai distribusi dari produsen ke konsumen |
| S4 | Dukungan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN | W4 | Belum optimalnya fungsi dan peran kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) |
| No | PELUANG (O) | NO | ANCAMAN (T) |
| O1 | Permintaan pangan yang terus meningkat | T1 | Perubahan iklim yang ekstrim |
| O2 | Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan dan menyediakan pangan lokal menghadapi pasca timah | T2 | Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat |
| O3 | Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang aman semakin meningkat | T3 | Harga pangan yang sangat berfluktuatif |
| O4 | Meningkatnya minat masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat | T4 | Perubahan pola konsumsi pangan yang didominasi oleh pangan impor |

Dari analisa lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya, maka diketahui beberapa peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Badan Ketahanan Pangan berdasarkan matrik dibawah ini.

Formulasi analisa SWOT Badan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Matrik Formulasi Analisis SWOT Badan Ketahanan Pangan

| | | |
|---|---|---|
| <p style="text-align: center;">Faktor</p> <p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> | <p style="text-align: center;">Strength (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dalam penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi; 2. Potensi sumberdaya pangan lokal yang tersedia | <p style="text-align: center;">Weakness (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan keamanan pangan segar 2. Rendahnya ketersediaan pangan dari produksi lokal |
| <p style="text-align: center;">Opportunity (Peluang)</p> | <p style="text-align: center;">Strategi SO</p> | <p style="text-align: center;">Strategi WO</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan pangan yang terus meningkat 2. Meningkatnya minat masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen penganggaran dalam memenuhi ketersediaan pangan masyarakat 2. Kembangkan peningkatan ketahanan pangan dengan sumberdaya pangan lokal yang tersedia pada tingkat rumah tangga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi teknologi pengolahan hasil pangan berbasis GAP dan HACCP 2. Memberdayakan masyarakat dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi pangan dengan memanfaatkan pekarangan |
| <p style="text-align: center;">Threat (Ancaman)</p> | <p style="text-align: center;">Strategi ST</p> | <p style="text-align: center;">Strategi WT</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan iklim yang ekstrim 2. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan evaluasi rencana penyediaan pangan terhadap perubahan iklim 2. Cipatakan sumber pangan alternatif sebagai pangan dan gizi masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokuskan pada pelaksanaan program P2KP/KRPL dan program ketahanan pangan lainnya 2. Efektifkan gerakan one day no rice secara konsisten |

Dari matrik formulasi analisis SWOT diatas pada tabel berikut ini disajikan faktor kunci keberhasilan (FKK) yang akan dicapai.

Tabel 6. Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) pada Analisis SWOT Badan Ketahanan Pangan

| No | Faktor Kunci Keberhasilan | | Alternatif Tujuan (Turunan Strategi SO) |
|----|--|---|---|
| | Kekuatan (S) | Peluang Kunci (O) | |
| 1 | Komitmen dalam penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi; | Permintaan pangan yang terus meningkat | Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan |
| 2 | Potensi sumberdaya pangan lokal yang tersedia | Meningkatnya minat masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat | Meningkatkan pengelolaan progam pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat |

Hasil dari faktor kunci keberhasilan (FKK) melalui alternatif tujuan dari turunan stategi SO pada analisis SWOT Badan Ketahanan Pangan akan dijabarkan kedalam sasaran, kebijakan dan program kegiatan pada Bab IV.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2012 – 2017, maka Visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 adalah ***”Terwujudnya Institusi ketahanan pangan yang handal dalam rangka tercapainya ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya wilayah secara efektif, efisien dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera.”***

Memperhatikan visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017, maka misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan serta pengembangan dan pemantauan ketahanan pangan.
2. Menumbuhkembangkan dan memantapkan kelembagaan ketahanan pangan;
3. Mendorong peningkatan kemampuan aparat dan peran serta lembaga masyarakat dalam pengelolaan ketahanan pangan
4. Meningkatkan koordinasi yang bersinergi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan.

Dari Misi dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 mengarah kepada Misi ke 2 RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu **Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)** melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan

pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang harus diselesaikan oleh suatu SKPD. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Tujuan strategis jangka menengah dalam mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan dengan memberdayakan potensi lokal adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan;
2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
3. Meningkatkan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dibidang ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat
4. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat;
5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras perkapita;
6. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan Tahun 2012-2017 berdasarkan visi, misi dan tujuan, meliputi:

1. Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;
2. Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan minimal 1% setiap tahun;
3. Tercapainya peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari;
4. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2015 sebesar 90;
5. Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
6. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen;
7. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|---|---|---------------------------------------|-------|-----|-----|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; | Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari; | - Tersedianya ketersediaan energi 2200 Kkal/kap (%) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| | | | - Tersedianya energi protein penduduk 57 gram/kap (%) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 2 | Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan | Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan minimal 1% setiap tahun | - Tersedianya cadangan pangan pemerintah 200 ton | 25 | 50 | 120 | 140 | 200 |
| | | | - Tersedianya cadangan pangan masyarakat 1000 Kg | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| | | | - Terlaksananya intervensi daerah rawan pangan di Kab/Kota | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | - Terlaksananya pengembanan desa mandiri pangan | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 |
| 3 | Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas dan pasokan serta harga yang dapat diakses oleh masyarakat | Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat | - Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan mingguan | 24 | 36 | 52 | 52 | 52 |
| | | | - Terlaksananya pengembangan kawasan rumah tangga pangan lestari berbasis percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal dalam upaya penurunan konsumsi beras perkapita | Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2015 sebesar 90; | - Tersedianya Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 84,4 | 87,05 | 90 | 95 | 95 |
| | | | - Tersedianya peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari | | | | | |
| 5 | Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar | Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen | - Terlaksananya pengawasan keamanan pangan secara berkala dan berkelanjutan diseluruh kab/kota | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | - Terlaksananya sertifikasi pangan segar hasil pertanian melalui OKKP-D (sertifikasi Prima, GHP, GMP dan Registrasi) | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| | | | - Terlaksananya forum koordinasi Dewan Ketahanan Pangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan | | | | | | |

4.3. Strategi dan Kebijakan

Keberhasilan manajemen dalam organisasi sebenarnya terlihat dari kemampuan organisasi beradaptasi terhadap lingkungan strategik yang berubah sedemikian cepat. Selain data-data historis yang dimiliki organisasi sebagai pendukung perencanaan, organisasi juga harus tanggap terhadap lingkungan eksternal dan sektor-sektor lain yang terkait. Oleh karena itu organisasi dalam suatu perencanaan harus melakukan analisis lingkungan strategis.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemilihan strategi merupakan proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan.

Strategi yang akan ditempuh SKPD Badan Ketahanan Pangan 2012-2017 meliputi:

1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar;
2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar;
3. Mendorong peranserta swasta, masyarakat sipil, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar;
4. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat;

5. Medorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat;
6. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan 2012-2017 adalah untuk:

- (1) Meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan,
- (2) Meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan, serta
- (3) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk: (a) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan; (b) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; dan (c) mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi dan stabilitasi harga pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan; (b) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan; dan (c) meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.

Aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, (b) mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial, dan (c) mengembangkan keamanan pangan segar di daerah sentra pangan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan manajemen, antara lain: (a) peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; (b) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan dan lintas sektor terkait misalnya dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

B A B V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan ditetapkan strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Prioritas yang menjadi urusan wajib ketahanan pangan pada tahun 2012-2017 adalah pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan baik dari aspek ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi pangan serta manajemen kelembagaan ketahanan pangan.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5.1. Program Strategis

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalui strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program peningkatan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan program dalam mendukung aktivitas perkantoran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya peningkatan disiplin aparatur di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam peningkatan kinerja aparatur.

4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dilakukan melalui Badan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memfasilitasi upaya koordinasi, pemantauan, pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan dan pengembangan di bidang ketahanan pangan. Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dilakukan bertujuan untuk memfasilitasi upaya koordinasi, pemantauan, pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan dan pengembangan di bidang ketahanan pangan. Sasaran yang ingin dicapai yaitu: (1) Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan; (2) Meningkatnya kualitas pengkajian, pemantauan dan pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan; serta (3) Meningkatnya peran kelembagaan ketahanan pangan masyarakat.

5. Program yang mendukung RPJMD Tahun 2012 – 2017

Berdasarkan analisis isu-isu strategis dan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan, program/kegiatan yang mendukung program unggulan daerah yang menjadi program prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2012 – 2017. Adapun program/kegiatan tersebut yaitu :

1. Pengembangan Cadangan Pangan dalam mendukung program unggulan pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi.
2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam mendukung program unggulan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

3. Penanganan Daerah Rawan Pangan dalam mendukung program unggulan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan mendukung program unggulan pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi.
5. Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman mendukung program unggulan pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi.
6. Promosi Pangan Lokal mendukung program unggulan pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi.
7. Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien mendukung program unggulan pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi.
8. Pengembangan Pangan Lokal mendukung program unggulan pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi.
9. Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) mendukung program unggulan pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi.
10. Pengkajian Makanan Tradisional mendukung program unggulan pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi.

6. Program yang Mendukung Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf m dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, ketahanan pangan merupakan urusan wajib. Untuk keberhasilan urusan wajib ketahanan pangan tercermin berdasarkan target capaian jenis pelayanan dasar dan indikator Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan Provinsi. Adapun kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendukung Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan adalah :

1. Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan mendukung pencapaian SPM Ketersediaan dengan nilai 90.

2. Penanganan Daerah Rawan Pangan mendukung pencapaian SPM penanganan daerah rawan pangan 60% pada tahun 2015.
3. Pengembangan Cadangan Pangan mendukung pencapaian SPM penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2015.
4. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan mendukung pencapaian SPM Pola Pangan Harapan 90% pada tahun 2015.
5. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan mendukung pencapaian SPM pembinaan dan pengawasan keamanan pangan 80% pada tahun 2015
6. Sosialisasi Penanganan Keamanan Pangan mendukung pencapaian SPM 80% pada tahun 2015.
7. Promosi Keamanan Pangan mendukung pencapaian SPM pembinaan dan pengawasan keamanan pangan 80% pada tahun 2015
8. Pengadaan Rapid Tes untuk Pengawasan Keamanan Pangan mendukung pencapaian SPM pembinaan dan pengawasan keamanan pangan 80% pada tahun 2015.
9. Promosi Pangan Lokal mendukung pencapaian SPM Pola Pangan Harapan 90% pada tahun 2015.
10. Pengembangan Pangan Lokal mendukung pencapaian SPM Pola Pangan Harapan 90% pada tahun 2015..
11. Pengkajian Makanan Tradisional mendukung pencapaian SPM Pola Pangan Harapan 90% pada tahun 2015.
12. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan mendukung pencapaian SPM informasi akses pangan 90% pada tahun 2015.
13. Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan mendukung pencapaian SPM informasi pasokan pangan 90% pada tahun 2015.
14. Pemantauan Akses Pangan Daerah Pesisir mendukung pencapaian SPM informasi akses pangan 90% pada tahun 2015.
15. Pemantauan dan Analisis harga Pangan mendukung pencapaian SPM informasi harga pangan 90% pada tahun 2015.
16. Pemantauan dan Analisis harga Pangan Daerah Terpencil mendukung pencapaian SPM informasi harga pangan 90% pada tahun 2015

5.2. Kegiatan Strategis dan Pendanaan Indikatif

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk melaksanakan program di atas, maka disusun kegiatan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 terdapat pada tabel 9.

5.3. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program/kegiatan. Sedangkan untuk kelompok sasaran utama yang menjadi objek perencanaan pembangunan diantaranya adalah aparatur dan program/kegiatan pembangunan daerah.

Indikator kinerja program, kegiatan dan kelompok sasaran dari Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 yang akan dicapai terdapat pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 8 (lanjutan)

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Awal Thn Perencanaan | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|--|---|--|---------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--|--------|-----------------------------|----------|--|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Kondisi Kinerja pd Akhir Periode Renstra | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. Jt | Target | Rp. Jt | Target | Rp. Jt | Target | Rp. Jt | Target | Rp. Jt | Target | Rp. Jt | | | |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | - Pakaian Dinas PNSD | 35 PNS | 40 | 19 | 45 | 25 | 50 | 30 | 55 | 35 | 60 | 40 | 60 | 149 | BKP | Prov | |
| | | | Pengadaan Meubelair/Komputer | - Meubelair/komputer Badan | 1 Badan | 1 | 250 | - | - | 1 | 350 | 1 | 400 | 400 | 375 | 1 | 1.375 | BKP | Prov | |
| | | | Pengadaan Mobil | - Microbis | 4 mobil | 1 | 300 | 1 | 350 | 1 | 350 | - | - | 1 | 375 | 1 | 1.375 | BKP | Prov | |
| | | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat, ketersediaan energi & energi protein yg cukup, menurunnya konsumsi beras & terigu, tersedianya cadangan pangan bagi masyarakat serta tumbuhnya ekonomi & usaha kelompok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan | - Data analisis ketersediaan pgn | 7 kab/kota | 7 | 74 | 7 | 100 | 7 | 125 | 7 | 130 | 7 | 135 | | 564 | BKP | Kab/kota | |
| | | | Penanganan Daerah Rawan Pangan | - Peta FSVA | 4 Kab | 3 | 100 | 3 | 200 | 3 | 350 | 3 | 350 | 3 | 350 | 15 | 1.350 | BKP | Kab/kota | |
| | | | Pengembangan Cadangan Pangan | - Bantuan logistik pgn | 1 Kab | 2 | 50 | 4 | 100 | 7 | 350 | 7 | 350 | 7 | 350 | 7 | 1.200 | BKP | Kab/kota | |
| | | | | - Fasilitasi CPP | 0 Ton | 100 | 1.200 | 150 | 1.600 | 200 | 2.100 | 200 | 2.100 | 200 | 2.100 | 850 | 9.100 | BKP | Provinsi | |
| | | | Pengembangan Desa Mandiri Pangan | - Fasilitasi CPM | 14 lumbung | 14 | 96 | 20 | 450 | 26 | 570 | 28 | 610 | 30 | 650 | 30 | 2.376 | BKP | Kab/kota | |
| | | | | - Peningkatan kapasitas Desa mandiri pangan | 60 desa | 3 | 100 | 3 | 400 | 3 | 500 | 3 | 600 | 3 | 700 | 15 | 2.300 | BKP | Kab/kota | |
| | | | - Analisis & Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan | - Skor PPH | 82,6 | 83,9 | 150 | 87,1 | 250 | 90,3 | 250 | 93,5 | 300 | 95 | 300 | 95 | 1.250 | BKP | Kab/kota | |
| | | | - Sosialisasi Penanganan Keamanan Pangan | - Pelaku usaha pangan segar di Kab/Kota | 0 Kab/Kota | 7 | 100 | 7 | 150 | 7 | 200 | 7 | 250 | 7 | 250 | 7 | 950 | BKP | Kab/kota | |
| | | | Peningkatan Mutu & Keamanan Pangan | - Pengujian sampel pangan segar pertanian | 25 sampel | 40 | 250 | 45 | 300 | 50 | 300 | 55 | 350 | 63 | 400 | 253 | 1.600 | BKP | Kab/kota | |
| | | | - Promosi Keamanan Pangan | - Promosi kemandirian pgn | 0 Kab/Kota | 4 | 150 | 4 | 200 | 5 | 250 | 6 | 300 | 7 | 300 | 7 | 1.200 | BKP | Kab/kota | |
| | | | - Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) | - Operasional untuk sertifikasi & registrasi pangan segar | 6 Sertifikasi | 2 | 200 | 2 | 250 | 3 | 300 | 3 | 300 | 5 | 350 | 15 | 1.400 | BKP | Provinsi | |
| | | | - Pengadaan Rapid Tes untuk Pengawasan Keamanan Pangan | - Tersedianya pestisida rapid tes | 0 paket | 8 | 200 | 8 | 250 | 10 | 250 | 10 | 350 | 12 | 350 | 48 | 1.400 | BKP | Kab/kota | |
| | | | Pengembangan Pangan Lokal | - Optimalisasi kel wanita dalam memanfaatkan pekarangan | 0 kelompok | - | - | 15 | 400 | 20 | 400 | 25 | 500 | 30 | 600 | 90 | 1.900 | BKP | Kab/kota | |
| | | | Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi dan Seimbang dan Aman | - Menu B2SA berbasis pangan lokal | 0 Kab/Kota | 7 | 150 | 7 | 150 | 7 | 150 | 7 | 150 | 7 | 150 | 7 | 750 | BKP | Provinsi | |
| | | | - Pengkajian Makanan Tradisional | - Kerjasama dg PT dlm mengembangkan makanan tradisional | 1 komoditi | 1 | 150 | 1 | 175 | 1 | 175 | 2 | 200 | 2 | 300 | 7 | 1.000 | BKP | Provinsi | |
| | | | - Pemantauan & Analisis Pasokan pgn | - Data pasokan pgn | 0 Kab/Kota | - | - | - | - | 7 | 100 | 7 | 150 | 7 | 170 | 21 | 420 | BKP | Provinsi | |

Tabel 8 (lanjutan)

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Awal Thn Perencanaan | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--|--------|-----------------------------|----------|
| | | | | | | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | Tahun-5 | | Kondisi Kinerja pd Akhir Periode Renstra | | | |
| | | | | | | Target | Rp. Jt | Target | Rp. Jt | Target | Rp. Jt | Target | Rp. Jt | Target | Rp. Jt | Target | Rp. Jt | | |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | Promosi Pangan lokal | - Promosi P2KP di Prov/Kab/Kota | 7 Kab/kota | 7 | 100 | 7 | 200 | 7 | 250 | 8 | 300 | 8 | 350 | 8 | 1.200 | BKP | Kab/kota |
| | | | Pemantauan, Monev dan Pembinaan KRPL/ P2KP | - Pembinaan dan Monev kel wanita & usaha kecil bidang pangan | 7 Kab/Kota | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 | 400 | BKP | Kab/kota |
| | | | - Pengembangan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal | - Pengembangan pengolahan pangan lokal | 1 komodori | 1 | 250 | 2 | 300 | 2 | 300 | 3 | 350 | 3 | 400 | 11 | 1.600 | BKP | Provinsi |
| | | | Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan | - Data potensi pangan lokal | 0 Kab/kota | 7 | 400 | - | - | - | - | - | - | 7 | 400 | 7 | 800 | BKP | Kab/kota |
| | | | Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan | Data kajian pasokan dan pemasaran pangan | 0 Kab/Kota | 7 | 150 | 7 | 150 | 7 | 175 | 7 | 175 | 7 | 175 | 7 | 825 | BKP | Kab/kota |
| | | | Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Pedesaan & Perkotaan | - Peta akses pangan perkotaan & pedesaan | 7 Kab/Kota | 7 | 84 | 7 | 150 | 7 | 200 | 7 | 250 | 7 | 275 | 7 | 959 | BKP | Kab/kota |
| | | | Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok | - Data & Informasi Harga Pangan Strategis | 24 Minggu | 24 | 80 | 36 | 150 | 52 | 200 | 52 | 220 | 52 | 250 | 216 | 900 | BKP | Kab/kota |
| | | | Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien | - Model distribusi pangan yang efisien | 0 Kab/kota | 7 | 135 | 7 | 140 | 7 | 145 | 7 | 150 | 7 | 155 | 7 | 725 | BKP | Kab/kota |
| | | | - Koordianasi Kebijakan Perberasan | - Pertemuan koordinasi perberasan | 0 provinsi | 1 | 65 | 1 | 70 | 1 | 75 | 1 | 80 | 1 | 85 | | 375 | BKP | Kab/kota |
| | | | - Pemetaan Jaringan Distribusi Pangan | - Peta Jaringan Distribusi | 0 peta kab/kota | 7 | 120 | 7 | 150 | 7 | 170 | 7 | 200 | 7 | 220 | 7 | 860 | BKP | Kab/kota |
| | | | - Pemantauan Akses Pangan Daerah Pesisir | - Peta akses pangan daerah pesisir | 0 peta kab/kota | 7 | 50 | 7 | 60 | 7 | 70 | 7 | 80 | 7 | 90 | 7 | 350 | BKP | Kab/kota |
| | | | - Pemantauan & Analisis Harga Pangan di Pulau Terpencil | - Data & infomasi akses harga pangan daerah terpencil | 0 Kab/Kota | 3 | 30 | 4 | 100 | 7 | 200 | 7 | 250 | 7 | 300 | 7 | 880 | BKP | Kab/kota |
| | | | - Apresiasi Distribusi Harga & Akses Pangan | - Penguatan sdm | 1 provinsi | 1 | 150 | 1 | 180 | 1 | 180 | 1 | 180 | 1 | 180 | 5 | 870 | BKP | Kab/kota |
| | | | - Bimtek Pengembangan Metode Pemantauan | - Penguatan sdm kab/kota | 0 sdm | 24 | 150 | 24 | 180 | 24 | 180 | 24 | 180 | 24 | 180 | 120 | 870 | BKP | Provinsi |
| | | | Operasional Dewan Ketahanan Pangan Forum Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan | - Rakor DKP | 1 provinsi | 1 | 100 | 1 | 125 | 1 | 125 | 1 | 130 | 1 | 130 | 5 | 610 | BKP | Provinsi |
| | | | | - Dokumen perencanaan | 1 dokumen | 1 | 50 | 1 | 100 | 1 | 150 | 1 | 200 | 1 | 200 | 5 | 700 | BKP | Provinsi |
| | | | Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan | - Kel. Masyarakat yg berjasa dlm ketahanan pangan | 1provinsi | 1 | 130 | 1 | 135 | 1 | 140 | 1 | 145 | 1 | 150 | 5 | 700 | BKP | Provinsi |
| | | | | - Peningkatan kapasitas PNS | 1 provinsi | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 120 | 1 | 125 | 1 | 130 | 5 | 575 | BKP | Provinsi |
| | | | Penyusunan Data Base Ketahanan Pgn Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | - Data Ketahanan Pgn | 0 Kab/kota | - | - | 7 | 100 | 7 | 150 | 7 | 200 | 7 | 200 | 7 | 650 | BKP | Provinsi |
| | | | | - Kinerja Badan | 1 Badan | 1 | 75 | 1 | 85 | 1 | 100 | 1 | 120 | 1 | 130 | 5 | 510 | BKP | Provinsi |

B A B VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan rencana kegiatan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Berdasarkan tugas dan fungsi utama Badan Ketahanan Pangan dalam perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, pemberian perizinan dan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang ketahanan pangan, Badan Ketahanan Pangan melakukan pengkajian atas pelaksanaan rencana pembangunan ketahanan pangan baik dari aspek ketersediaan, distribusi dan harga pangan; melakukan penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan; serta pembinaan agar seluruh sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai.

Memperhatikan tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilaksanakan, maka indikator kinerja pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada RPJM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah:

1. Tersedianya ketersediaan energi bagi penduduk sebesar 2200 Kkal/kapita dan ketersediaan energi protein 57 gram.kapita;
2. Tersedianya cadangan pangan melalui cadangan pangan perintah (CPP) sebanyak 200 ton dan cadangan pangan masyarakat (CPM) sebanyak 1000 Kg per lumbung;
3. Terlaksananya intervensi terhadap daerah yang mengalami rawan pangan di 7 kabupaten/kota;
4. Tersedianya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan;
5. Terlaksananya pengembangan kawasan rumah pangan lestari berbasis percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;

6. Tersedianya Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

7. Terlaksananya pengawasan terhadap pangan segar pertanian yang beredar dimasyarakat,

Indikator kinerja SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdapat pada tabel berikut :

Tabel 9
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
SKPD Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2012 - 2018

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Tahun-0 | Tahun-1 | Tahun-2 | Tahun-3 | Tahun-4 | Tahun-5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Ketersediaan Energi perkapita (Kkal) | 2.230 | 1760 | 1870 | 1980 | 2090 | 2200 | 2.426 |
| 2. | Ketersediaan Energi protein perkapita (gram) | 116 | 51 | 51 | 51 | 54 | 57 | 76 |
| 3. | Cadangan pangan pemerintah (Ton) | 0 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 850 |
| 4. | Cadangan pangan masyarakat (Kg/lumbung) | 0 | 1000 | 2000 | 3600 | 3600 | 4500 | 14.700 |
| 5. | Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan (informasi mingguan) | 24 | 24 | 36 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 7. | Pola Pangan Harapan | 86,2 | 84,4 | 87,05 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 8. | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar (Kab/Kota) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 63 | 253 |
| 9. | Penanganan daerah rawan pangan (KK/Kab/Kota) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 10 | Jumlah pembentkan desa mandiri pangan 3 desa per tahun | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |